TSAQAFATUNA
Jurnal Ilmu Pendidikan Islam

p-ISSN: 2654 -5322
e-ISSN:2654 - 5330
DOI: https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.

Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan
Vol. 8, No. 2, Oktober 2026

Dualisme Menuju Integrasi : Transformasi Pendidikan Islam Indonesia 1945–1998 Melalui Tinjauan Literatur Sistematis

***Syibromilisi[1], Nurul Khoirunnisa[2], Lulu Alwiyah[3], Agus Alif Humaydiy[4], Muhamad Mujadid[5]**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia[2,3,4,]
STIT Buntet Pesantren Cirebon[1&5]

syibro92@gmail.com[1], nurulkn06@gmai.com[2], alwiyahlulu96@gmail.com[3], angumay0405@gmail.com[4], muhamadmujadid@gmail.com[5]

Abstrak

Tujuan Penelitian ini menelaah transformasi pendidikan Islam di Indonesia dari struktur dualistik menuju integrasi dalam sistem pendidikan nasional pada 1945-1998, dengan menekankan keterkaitan kebijakan negara, respons kelembagaan, perubahan kurikulum, dan identitas sosio-kultural. Metode Kajian menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan sintesis tematik dan naratif serta pelaporan seleksi mengacu pada PRISMA 2020. Diagram seleksi mencatat 93 rekaman awal dan 34 studi terinklusi, sedangkan sintesis mendalam bertumpu pada 16 studi yang karakteristik dan temuan utamanya terdokumentasi secara terperinci. Pemetaan ko-kemunculan istilah digunakan sebagai analisis deskriptif pelengkap. Temuan Sintesis mengidentifikasi lima tema yang saling terkait, yaitu dualisme pascakemerdekaan, perubahan orientasi kebijakan negara, diferensiasi adaptasi kelembagaan, konvergensi kurikulum dan persoalan epistemologi, serta keberlanjutan identitas sosio-kultural. Pengakuan pendidikan Islam menguat melalui SKB Tiga Menteri 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tetapi madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan pendidikan tinggi menunjukkan strategi penyesuaian yang berbeda. Implikasi penelitian Integrasi pendidikan Islam merupakan proses institusional yang bertahap dan tidak seragam, bukan sekadar penyetaraan administratif. Kerangka Dualism-to-Integration membedakan pengakuan regulatif, konvergensi kurikuler, dan integrasi epistemologis sebagai dimensi analisis sejarah pendidikan Islam.

Kata kunci: pendidikan Islam Indonesia, dualisme pendidikan, integrasi pendidikan nasional, kebijakan pendidikan Islam, tinjauan literatur sistematis.

Abstract

Purpose This study examines the transformation of Islamic education in Indonesia from a dualistic structure toward integration into the national education system between 1945 and 1998, focusing on state policy, institutional responses, curricular change, and socio-cultural identity. Design/methodology/approach A systematic literature review employed thematic and narrative synthesis, with study selection reported with reference to PRISMA 2020. The selection diagram records 93 identified records and 34 included studies, while the in-depth synthesis draws on 16 studies with explicitly documented characteristics and findings. Exploratory term co-occurrence mapping provides a complementary description of research emphases. Findings Five interrelated themes emerged: post-independence educational dualism, changes in state policy, differentiated institutional adaptation, curricular convergence and epistemological issues, and the continuity of socio-cultural identity. The 1975 Joint Decree of Three Ministers and Law No. 2 of 1989 strengthened regulatory recognition, but madrasahs, pesantren, Islamic schools, and Islamic higher education followed different paths of adjustment. Research implications The integration of Islamic education is best understood as a gradual and uneven institutional process rather than administrative equalization alone. The proposed Dualism-to-Integration Framework distinguishes regulatory recognition, curricular convergence, and epistemological integration as separate dimensions for interpreting the history of Islamic education.

Keywords: *Indonesian Islamic education, educational dualism, national education integration, Islamic education policy, systematic literature review.*

Copyright © 2024 The Author(s). This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 international license. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Pendahuluan

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan memperlihatkan hubungan yang dinamis antara penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat Muslim dan pembentukan sistem pendidikan nasional. Dalam rentang 1945–1998, pendidikan umum, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam berkembang melalui jalur kelembagaan serta otoritas administratif yang berbeda. Tanjung (2022) menggambarkan konfigurasi tersebut sebagai dualisme pendidikan yang diwarisi pada masa pascakemerdekaan. Dalam konteks ini, dualisme tidak hanya berkaitan dengan pemisahan jenis lembaga, tetapi juga dengan perbedaan legitimasi administratif, orientasi kurikulum, kedudukan pengetahuan agama, dan akses terhadap jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, perubahan pendidikan Islam perlu dipahami sebagai transformasi sistemik yang melibatkan dimensi politik dan sosial sekaligus.

Kajian mengenai Orde Lama menunjukkan bahwa negara mulai membangun landasan pengaturan pendidikan agama melalui pengembangan madrasah, pendidikan guru agama, dan perguruan tinggi Islam (Luthfiyani & Sirozi, 2023). Memasuki Orde Baru, hubungan negara dengan pendidikan Islam mengalami penyesuaian yang semakin kuat melalui kebijakan pengakuan dan standardisasi. Kosim et al. (2023) menguraikan perubahan orientasi kebijakan dari domestikasi menuju akomodasi, sedangkan penelitian mengenai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menempatkan kedua kebijakan tersebut sebagai titik penting penguatan kedudukan madrasah dalam sistem nasional (Nazifa et al., 2025; Nurhayati, 2025). Perubahan tersebut tidak berlangsung dalam ruang institusional yang homogen, sebab masing-masing lembaga memiliki sejarah, otoritas, dan tujuan pendidikan yang berbeda.

Kajian tentang transformasi kelembagaan memperlihatkan keragaman respons terhadap perubahan kebijakan. Penelitian Huda (2022) menunjukkan bahwa penguatan pelajaran umum dalam madrasah berjalan beriringan dengan kebutuhan menjaga kaderisasi ulama melalui Madrasah Aliyah Program Khusus. Dalam konteks pesantren, Siregar (2026) menjelaskan modernisasi melalui penyesuaian selektif yang tetap mempertahankan kesinambungan tradisi pendidikan Islam. Sementara itu, studi Pribadi et al. (2024) mengenai sekolah Islam terpadu pada 1980–1998 dan penelitian Sugianto et al. (2024) tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam memperluas perhatian pada diferensiasi bentuk kelembagaan. Ragam temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan posisi pendidikan Islam di tingkat nasional tidak identik dengan penyeragaman karakter institusi.

Walaupun penelitian terdahulu telah menguraikan aspek historis, kebijakan, dan kelembagaan secara mendalam, hubungan antardimensi tersebut masih perlu dibaca melalui kerangka sintesis yang terpadu. Kajian kebijakan cenderung menekankan perubahan hubungan negara dan masyarakat Muslim, sedangkan penelitian kelembagaan memberi perhatian pada strategi madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan pendidikan tinggi. Di sisi lain, kajian kurikulum dan epistemologi menyoroti cara pengetahuan agama ditempatkan dalam sistem pendidikan modern (Buchori et al., 2023; Muqowim & Lessy, 2021). Dengan mempertemukan arah temuan tersebut, tinjauan literatur sistematis memungkinkan identifikasi pola perubahan yang melintasi jenis lembaga dan periode politik, sekaligus memperjelas perbedaan antara integrasi administratif, kurikuler, dan epistemologis.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana literatur ilmiah terbitan 2021–2026 menjelaskan transformasi pendidikan Islam Indonesia sepanjang 1945–1998 dari struktur dualistik menuju integrasi bertahap. Analisis difokuskan pada bentuk dualisme pascakemerdekaan, peran kebijakan negara, variasi adaptasi kelembagaan, perubahan kurikulum dan epistemologi, serta negosiasi identitas sosio-kultural. Melalui sintesis lintas studi, penelitian ini bertujuan merumuskan penjelasan konseptual tentang pola integrasi pendidikan Islam yang mempertimbangkan keberlanjutan tradisi dan diferensiasi lembaga.

Metode Penelitian

Desain dan ruang lingkup kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) untuk menyintesis hasil penelitian yang membahas transformasi pendidikan Islam Indonesia pada periode sejarah 1945–1998. Artikel yang dikaji merupakan publikasi ilmiah tahun 2021–2026 sehingga periode penerbitan dibedakan dari periode historis yang menjadi objek analisis. Prosedur pelaporan proses seleksi merujuk pada PRISMA 2020 (Page et al., 2021), sedangkan pengorganisasian dan penyajian sintesis mengikuti prinsip telaah literatur yang dikemukakan Snyder (2019). Pendekatan naratif-tematik dipilih karena sumber penelitian memuat desain historis, analisis kebijakan, dan kajian kepustakaan dengan fokus yang berbeda, sehingga lebih tepat dibandingkan penggabungan ukuran efek secara statistik.

Sumber informasi dan strategi penelusuran

Penelusuran literatur dalam dokumentasi penelitian mencakup Scopus, Web of Science Core Collection, Dimensions, dan Google Scholar. Strategi pencarian menggabungkan kelompok istilah yang berkaitan dengan Islamic education, madrasah, pesantren, Indonesia, Old Order, New Order, dualism, integration, transformation, policy, dan modernization. Contoh rumusan kueri

adalah ("Islamic education" OR madrasah OR pesantren OR "Islamic boarding school") AND (Indonesia OR Indonesian) AND ("Old Order" OR "New Order" OR "Orde Lama" OR "Orde Baru" OR "1945–1998") AND (dualism OR integration OR transformation OR modernization OR policy). Kombinasi istilah tersebut digunakan untuk menjangkau penelitian sejarah pendidikan Islam dari perspektif politik, kurikulum, dan kelembagaan.

Rentang publikasi ditetapkan sampai Oktober 2026, dengan bahasa Indonesia dan Inggris sebagai cakupan penelusuran. Dokumentasi yang menjadi dasar artikel memuat sumber pencarian, kelompok kata kunci, dan ringkasan hasil identifikasi. Informasi teknis berupa riwayat kueri per basis data, tanggal penelusuran, serta batasan pengambilan hasil tidak tercantum secara lengkap. Oleh sebab itu, uraian strategi pencarian disajikan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi, sedangkan keterulangan penelusuran dinilai sesuai cakupan informasi yang tersedia sebagaimana ditekankan dalam PRISMA-S (Rethlefsen et al., 2021).

Kriteria inklusi dan eksklusi

Studi dimasukkan apabila berupa artikel jurnal terbitan 2021–2026 dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang membahas pendidikan Islam di Indonesia dan memberikan penjelasan substantif mengenai sebagian atau seluruh periode 1945–1998. Relevansi substantif ditentukan berdasarkan pembahasan tentang dualisme pendidikan, kebijakan negara, integrasi dalam sistem nasional, transformasi kelembagaan, perubahan kurikulum, epistemologi, atau dinamika sosio-kultural. Dokumen nonjurnal, berita, editorial, resensi, dan tugas akhir tidak dimasukkan. Untuk penelitian yang mencakup masa setelah 1998, sintesis historis dibatasi pada informasi yang secara jelas berhubungan dengan periode penelitian.

Prosedur seleksi dan keterlacakan korpus

Publikasi diseleksi melalui tahap identifikasi, penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, penelusuran teks lengkap, serta penilaian kelayakan sesuai alur PRISMA 2020. Rekapitulasi diagram yang tersedia mencatat 34 studi terinklusi dari 93 rekaman awal. Dari kelompok tersebut, 16 studi memiliki uraian fokus, metode, dan temuan utama yang cukup terperinci untuk dibandingkan dalam tabel karakteristik. Pemisahan antara jumlah studi pada diagram alir dan jumlah studi dalam matriks sintesis dijelaskan secara eksplisit agar keluasan penelusuran tidak disamakan dengan kedalaman ekstraksi hasil.

Ekstraksi, sintesis, dan pengelolaan perbedaan temuan

Ekstraksi data dilakukan dengan menelaah identitas publikasi, fokus kajian, pendekatan penelitian, konteks sejarah, jenis institusi, kebijakan yang dibahas, dan temuan utama. Data kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi

keterulangan konsep, kesesuaian argumentasi, dan variasi hasil menurut periode maupun jenis lembaga. Proses sintesis menghasilkan lima kategori tematik, yakni dualisme pascakemerdekaan, kebijakan dan integrasi nasional, transformasi kelembagaan, kurikulum dan epistemologi, serta identitas sosio-kultural. Penyajian hasil menempatkan hubungan antartemuan sebagai dasar pembentukan kategori, sedangkan penjelasan teoritis dikembangkan pada bagian pembahasan.

Kekuatan temuan dinilai secara kualitatif melalui kesesuaian antara fokus kajian, pendekatan penelitian, dan informasi historis yang dipaparkan oleh sumber. Karena lembar penilaian kualitas individual serta matriks pengodean keseluruhan korpus tidak menyertai dokumentasi yang tersedia, penelitian ini tidak menggunakan skor mutu maupun pembobotan statistik antarsumber. Dengan demikian, sintesis diarahkan pada konsistensi penjelasan substantif dan perbedaan konteks, bukan pada penghitungan proporsi dukungan tiap tema dari seluruh studi terinklusi.

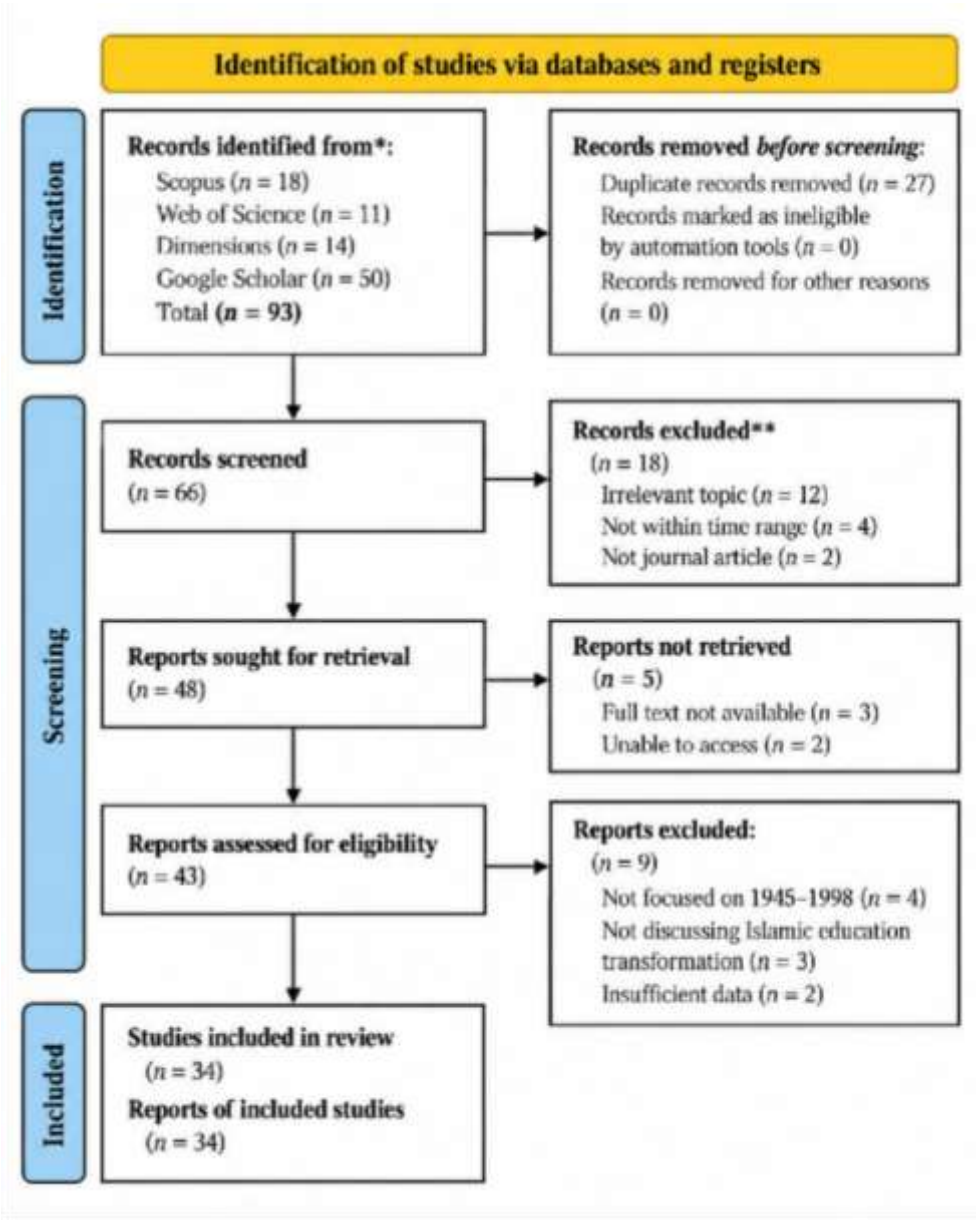
Analisis bibliometrik pelengkap

Analisis pelengkap memanfaatkan dokumentasi pemetaan ko-kemunculan istilah yang disajikan dalam bentuk visualisasi jaringan, overlay tahun publikasi, dan kepadatan dengan konvensi tampilan VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010). Ambang minimum dua kemunculan ditunjukkan pada gambar yang digunakan. Ukuran dan hubungan simpul dibaca sebagai representasi keterkaitan istilah dalam dokumentasi korpus, bukan ukuran kualitas studi atau pembuktian hubungan sebab-akibat historis. Karena berkas ekspor penghitungan dan parameter perangkat lunak tidak dilampirkan dalam naskah sumber, gambar diperlakukan sebagai visualisasi deskriptif yang menyertai analisis tematik, bukan sebagai hasil komputasi yang telah direplikasi secara independen.

Hasil dan Sintesis Literatur

Hasil identifikasi dan seleksi literatur

Alur seleksi pada Gambar 1 mencatat 93 rekaman dari Scopus (18), Web of Science (11), Dimensions (14), dan Google Scholar (50). Setelah penghapusan 27 duplikat, 66 rekaman menjalani penyaringan; 18 di antaranya dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak. Sebanyak 48 laporan dicari teks lengkapnya, tetapi lima tidak diperoleh. Penilaian terhadap 43 laporan menghasilkan sembilan eksklusi karena ketidaksesuaian periode historis (empat), fokus kajian (tiga), dan kecukupan informasi (dua). Dengan demikian, rekapitulasi PRISMA melaporkan 34 studi terinklusi. Angka-angka ini merupakan hasil pelaporan seleksi dalam dokumentasi kajian, bukan hasil audit ulang terhadap register pencarian per artikel.



Gambar 1. Diagram alir identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi studi berdasarkan PRISMA 2020.

Diagram pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penyaringan relevansi dan penilaian teks lengkap merupakan dua tahapan berbeda. Dari 66 rekaman yang disaring, 48 diteruskan ke penelusuran laporan; selanjutnya 43 laporan diperiksa kelayakannya hingga menghasilkan 34 studi terinklusi. Rangkaian ini memberikan gambaran transparan mengenai keputusan seleksi yang dilaporkan. Analisis substansi pada bagian berikut dibatasi pada informasi temuan yang dapat ditelusuri secara terperinci dalam tabel karakteristik studi.

Karakteristik Studi yang Dianalisis

Sebanyak 16 studi dalam matriks karakteristik menyediakan informasi terperinci mengenai fokus penelitian, metode, dan hasil utama. Studi-studi tersebut meliputi telaah historis, penelitian kepustakaan, analisis dokumen, dan kajian kebijakan. Secara substantif, pembahasannya mencakup perkembangan pendidikan Islam lintas rezim, penyetaraan madrasah, relasi organisasi pendidikan dengan negara, perubahan pesantren, serta dinamika pendidikan tinggi Islam. Keragaman fokus menunjukkan bahwa transformasi 1945–1998 tidak dapat direduksi menjadi satu jenis kebijakan atau satu lembaga pendidikan. Karakteristik keenam belas studi menjadi dasar analisis komparatif yang disajikan pada bagian berikut.

Tabel 1. Karakteristik, pendekatan, dan temuan utama studi dalam matriks sintesis.

Studi	Fokus	Pendekatan	Temuan utama
Tanjung (2022)	Pendidikan Islam 1945–1998	Pendekatan historis, studi pustaka	Pendidikan pascakemerdekaan masih ditandai dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan Islam.
Anjasari (2022)	Kebijakan Orde Lama dan Orde Baru	Library research	Posisi pendidikan agama meningkat secara bertahap dari Orde Lama menuju Orde Baru.
Huda (2022)	Kebijakan Orde Baru dan MAPK	Kualitatif, historis, analisis kebijakan	MAPK dikembangkan untuk mempertahankan fungsi madrasah dalam pembentukan kader ulama.
Luthfiyani & Sirozi (2023)	Politik pendidikan Islam Orde Lama	Library research, content analysis	Orde Lama membentuk berbagai fondasi kelembagaan pendidikan Islam.
Kosim et al. (2023)	Dinamika kebijakan pendidikan Islam	Kualitatif-historis, content analysis	Orientasi kebijakan berubah dari domestikasi menuju akomodasi.
Buchori et al. (2023)	Epistemologi pendidikan era Soeharto	Literature review, postcolonial perspective	Kebijakan pendidikan Islam berhubungan dengan orientasi politik dan struktur epistemologis.
Nurfadhilah et al. (2024)	Kebijakan lintas-rezim	Library research, historical analysis	Cakupan kebijakan pendidikan Islam berkembang dari pendidikan dasar menuju pendidikan tinggi.
Anwar et al. (2024)	Politik nasional dan PAI	Kajian literatur kebijakan	Perubahan posisi pendidikan Islam mengikuti konfigurasi politik nasional.
Nasution et al. (2024)	GUPPI 1968–1992	Literature review, historis	Perkembangan GUPPI berkaitan erat dengan struktur politik Orde Baru.

Pribadi et al. (2024)	Sekolah Islam Terpadu	Deskriptif kualitatif	Model sekolah Islam menggabungkan identitas keislaman dan pendidikan modern.
Sugianto et al. (2024)	Pendidikan tinggi Islam	Qualitative literature review	Pendidikan tinggi Islam berkembang secara kelembagaan tetapi menghadapi masalah kualitas dan sumber daya.
Muqofy (2024)	Transformasi pendidikan Islam	Literature review kualitatif	Pendidikan Islam berhubungan dengan identitas, karakter, kohesi sosial, dan perubahan masyarakat.
Nazifa et al. (2025)	Pendidikan Islam Orde Baru	Library research	Formalisasi madrasah dan regulasi nasional memperkuat integrasi pendidikan Islam.
Nurhayati (2025)	Kebijakan PAI Orde Baru	Studi pustaka	SKB 1975 dan UUSPN 1989 memperkuat posisi pendidikan agama dan madrasah.
Siregar (2026)	Transformasi pesantren	Historis kualitatif, analisis dokumen	Pesantren menggabungkan kontinuitas tradisi dengan adaptasi kurikulum dan metode modern.
Fatoni et al. (2026)	Kebijakan lintas-periode	Library research, analisis dokumen	Integrasi pendidikan Islam semakin menguat melalui regulasi dan institusionalisasi negara.

Rentang sejarah pada sebagian publikasi melampaui akhir Orde Baru. Dalam sintesis ini, uraian mengenai masa Reformasi digunakan sebagai konteks perkembangan lanjutan, sedangkan pembentukan kesimpulan historis tetap difokuskan pada kejadian dan institusi yang berkaitan dengan periode 1945–1998. Pembatasan tersebut memungkinkan pembacaan lintas periode tanpa mencampurkan karakteristik kebijakan pada masa yang berbeda.

Sintesis Tematik Temuan Penelitian

Sintesis lintas studi menghasilkan lima tema yang saling berhubungan. Tema pertama menguraikan bentuk dualisme pada masa awal kemerdekaan. Tema kedua memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan dan pengakuan negara terhadap pendidikan Islam. Tema ketiga menyoroti ragam adaptasi kelembagaan. Tema keempat membahas konvergensi kurikulum dan kedudukan ilmu agama, sedangkan tema kelima menempatkan identitas dan hubungan sosial sebagai unsur yang melekat dalam proses transformasi. Kelima tema membentuk alur penjelasan yang menghubungkan kondisi struktural, perubahan regulasi, dan respons institusional.

Dualisme pendidikan setelah kemerdekaan

Pendidikan Islam pascakemerdekaan berkembang dalam struktur yang menempatkan sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam pada jalur administratif yang berbeda. Tanjung (2022) memperlihatkan keberlanjutan dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan Islam selama Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan Luthfiyani dan Sirozi (2023) menunjukkan bahwa pemerintah mulai membentuk dasar pengelolaan pendidikan agama melalui pengembangan madrasah, Madrasah Wajib Belajar, pendidikan guru agama, dan perguruan tinggi agama Islam. Anjasari (2022) menegaskan bahwa peningkatan perhatian negara terhadap pendidikan agama berlangsung seiring dengan keberlanjutan perbedaan orientasi penyelenggaraan kedua jalur pendidikan tersebut.

Dalam sintesis ketiga kajian, dualisme dipahami sebagai perbedaan tata kelola, status kelembagaan, dan orientasi pengetahuan yang dibentuk melalui proses sejarah. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga pendidikan Islam mempertahankan sumber legitimasi yang berasal dari komunitas dan tradisi keagamaan, sementara negara mulai mengembangkan mekanisme pengakuan dan pembinaan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa integrasi berangkat dari hubungan yang telah terbentuk antara lembaga masyarakat dan administrasi negara. Dengan demikian, proses menuju kesatuan sistem pendidikan berlangsung melalui penataan hubungan antarlembaga, bukan penghapusan seketika atas karakter dualistik yang diwarisi.

Kebijakan negara dan pengakuan dalam sistem nasional

Perubahan orientasi kebijakan menjadi salah satu pola utama dalam historiografi pendidikan Islam periode 1945–1998. Kosim et al. (2023) menggambarkan pergeseran hubungan negara dengan pendidikan Islam dari kecenderungan domestikasi menuju akomodasi, sedangkan Nurfadhilah et al. (2024), Anwar et al. (2024), dan Fatoni et al. (2026) menempatkan perubahan kebijakan dalam dinamika politik lintas rezim. Pada masa Orde Baru, SKB Tiga Menteri 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memperoleh perhatian khusus karena memperkuat jalur pengakuan dan penyetaraan lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah (Nazifa et al., 2025; Nurhayati, 2025). Sintesis temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi memiliki landasan politik dan hukum yang berkembang secara bertahap.

Dalam praktik konseptualnya, pengakuan negara memunculkan hubungan yang erat antara kebutuhan standardisasi dan pemeliharaan fungsi keagamaan. Huda (2022) menjelaskan pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus sebagai respons terhadap kekhawatiran berkurangnya fungsi kaderisasi ulama di tengah penyesuaian struktur kurikulum madrasah. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai integrasi karena kebijakan penyetaraan tidak hanya menghasilkan penyesuaian kelembagaan, tetapi juga mendorong upaya

mempertahankan orientasi pendidikan yang khas. Oleh karena itu, proses integrasi berlangsung melalui negosiasi antara tuntutan kesetaraan dalam sistem nasional dan kebutuhan menjaga otoritas serta identitas institusi Islam.

Diferensiasi transformasi kelembagaan

Perubahan kelembagaan memperlihatkan bahwa kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam strategi institusional yang berbeda. Pada madrasah, pembaruan administratif dan kurikuler berkaitan langsung dengan agenda penyetaraan pendidikan (Huda, 2022; Nazifa et al., 2025). Pada organisasi penyelenggara pendidikan, Nasution et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan GUPPI pada 1968–1992 terkait dengan jaringan politik Orde Baru, sehingga dinamika kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan. Kajian Pribadi et al. (2024) tentang sekolah Islam terpadu pada 1980–1998 memperlihatkan upaya mempertemukan identitas Islam dengan model pembelajaran modern, sedangkan Sugianto et al. (2024) menggambarkan perluasan pendidikan tinggi Islam beserta tantangan kelembagaan, pendanaan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam tradisi pesantren, adaptasi kelembagaan mengambil bentuk penyesuaian yang selektif. Siregar (2026) menelusuri perubahan kurikulum dan metode pendidikan dari Orde Baru menuju Reformasi serta menunjukkan keberlanjutan tradisi keilmuan Islam di tengah modernisasi. Jika dibandingkan dengan madrasah, pesantren menampilkan corak perubahan yang lebih terkait dengan pengelolaan otoritas internal, kesinambungan tradisi, dan respons terhadap kebutuhan pendidikan formal. Perbandingan berbagai lembaga tersebut menghasilkan pola diferensiasi integrasi: pengakuan regulatif, modernisasi pembelajaran, perluasan institusi, dan reproduksi identitas tidak selalu berlangsung pada tingkat yang sama atau melalui strategi yang identik.

Perubahan kurikulum dan batas integrasi epistemologis

Reformasi kurikulum merupakan dimensi penting dari integrasi pendidikan Islam karena berhubungan langsung dengan posisi ilmu agama dan mata pelajaran umum. Kajian Nazifa et al. (2025) serta Nurhayati (2025) mengaitkan SKB Tiga Menteri 1975 dengan penyesuaian komposisi kurikulum madrasah dan penguatan hubungan jenjang pendidikan Islam dengan sistem nasional. Dalam konteks yang sama, studi Huda (2022) mengenai MAPK menunjukkan bahwa perluasan materi pelajaran umum berjalan bersamaan dengan kebutuhan menjaga kedalaman pembelajaran keagamaan. Sintesis temuan tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi kurikulum tidak sekadar menyangkut penambahan bidang studi, melainkan juga penataan kembali tujuan institusional pendidikan Islam.

Pada tingkat yang lebih mendasar, Buchori et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam era Soeharto berhubungan dengan

orientasi ideologis negara dan struktur legitimasi pengetahuan. Muqowim dan Lessy (2021) memperluas diskusi tentang hubungan ilmu agama dan ilmu modern dalam pendidikan tinggi Islam. Dengan membandingkan kedua arah kajian tersebut, integrasi kurikulum dapat dibedakan dari integrasi epistemologis. Konvergensi kurikulum berkaitan dengan pengaturan isi mata pelajaran dan akses pendidikan, sedangkan integrasi epistemologis menyangkut hubungan konseptual antara disiplin agama dan ilmu umum. Pembedaan ini menjelaskan mengapa penyetaraan kelembagaan tidak serta-merta meniadakan diferensiasi orientasi keilmuan.

Identitas sosio kultural dan hubungan negara dengan masyarakat

Dimensi sosio-kultural memperlihatkan bahwa perkembangan pendidikan Islam turut dibentuk oleh perubahan aspirasi masyarakat dan keberlanjutan identitas keagamaan. Muqofy (2024) menghubungkan transformasi pendidikan Islam dengan pembentukan identitas, karakter, dan kohesi sosial. Penelitian Pribadi et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan model sekolah Islam terpadu berkaitan dengan pertemuan antara nilai keislaman dan orientasi pendidikan modern. Sementara itu, Kosim et al. (2023) menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan negara dan masyarakat Muslim. Keseluruhan hasil tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor yang turut membentuk legitimasi, permintaan pendidikan, dan pilihan adaptasi kelembagaan.

Keberlanjutan tradisi di tengah pembaruan tampak pula dalam studi tentang pesantren. Siregar (2026) menunjukkan bahwa adaptasi metode dan kurikulum dapat berjalan tanpa menghilangkan identitas dasar lembaga. Dalam perspektif sintesis, perkembangan tersebut mengindikasikan hubungan timbal balik antara integrasi nasional dan reproduksi tradisi lokal: institusi pendidikan Islam mengadopsi sejumlah tuntutan modernisasi sembari mempertahankan norma dan orientasi sosial yang menopang keberadaannya. Dengan demikian, transformasi sosio-kultural tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi kebijakan negara, tetapi juga sebagai hasil penyesuaian institusi terhadap aspirasi komunitas pendukungnya.

Tabel 2. Sintesis komparatif lima tema transformasi pendidikan Islam.

Tema sintesis	Temuan lintas studi	Variasi institusional	Rujukan utama
Dualisme pascakemerdekaan	Perbedaan jalur, otoritas, dan kurikulum pendidikan Islam dan umum berlangsung seiring pembentukan dasar pengakuan negara.	Penguatan administrasi nasional tidak langsung menghapus legitimasi sosial lembaga Islam.	Tanjung (2022); Anjasari (2022); Luthfiyani & Sirozi (2023)

Kebijakan dan integrasi	Pergeseran orientasi negara menuju akomodasi diperkuat melalui pengaturan pendidikan Islam pada masa Orde Baru.	Standardisasi madrasah disertai upaya mempertahankan kaderisasi ulama melalui MAPK.	Kosim et al. (2023); Huda (2022); Nurhayati (2025)
Transformasi kelembagaan	Institusi pendidikan Islam mengembangkan strategi adaptasi menurut fungsi, jaringan organisasi, dan orientasi masing-masing.	Formalisasi madrasah, relasi politik organisasi, dan adaptasi selektif pesantren menunjukkan jalur perubahan yang berbeda.	Nasution et al. (2024); Pribadi et al. (2024); Sugianto et al. (2024); Siregar (2026)
Kurikulum dan epistemologi	Konvergensi kurikulum memperkuat hubungan dengan sistem nasional dan memperbarui posisi pengetahuan agama.	Penyesuaian mata pelajaran dapat berlangsung tanpa keseragaman dasar epistemologis.	Buchori et al. (2023); Huda (2022); Nazifa et al. (2025)
Identitas sosio-kultural	Perubahan pendidikan Islam berhubungan dengan aspirasi masyarakat, legitimasi sosial, dan reproduksi identitas keagamaan.	Modernisasi pendidikan berjalan bersama pemeliharaan tradisi dan nilai komunitas pendukung.	Muqofy (2024); Pribadi et al. (2024); Kosim et al. (2023)

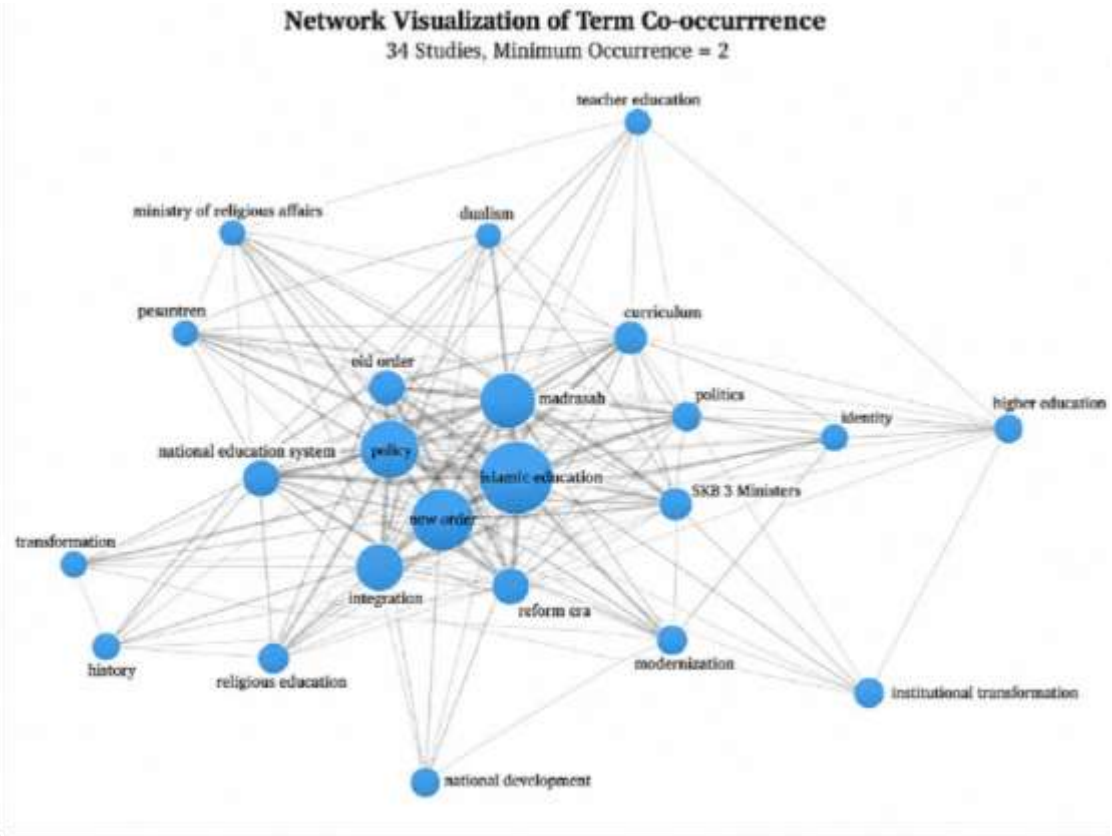
Pemetaan Bibliometrik sebagai Analisis Pelengkap

Pemetaan istilah menempatkan pendidikan Islam, kebijakan, perubahan rezim, serta lembaga pendidikan sebagai kelompok kosakata yang saling berhubungan. Dalam dokumentasi pemetaan, istilah Islamic education tercatat dengan occurrence 29 dan total link strength 142; policy memiliki 20 kemunculan dan kekuatan hubungan 107; New Order juga 20 kemunculan dengan kekuatan hubungan 106. Istilah madrasah (15), integration (14), dan national education system (13) turut menonjol. Statistik ini menggambarkan frekuensi dan keterhubungan terminologis pada data yang dipetakan, bukan jumlah penelitian yang secara substantif mendukung satu kesimpulan sejarah. Oleh karena itu, pembacaan gambar dikaitkan dengan temuan lima tema sintesis tanpa menyamakan kedekatan istilah dengan kekuatan bukti.

Tabel 3. Indikator ko-kemunculan istilah sebagaimana dicatat dalam dokumentasi pemetaan.

No.	Istilah	Occurrence	Total link strength
1	Islamic education	29	142
2	Policy	20	107
3	New Order	20	106

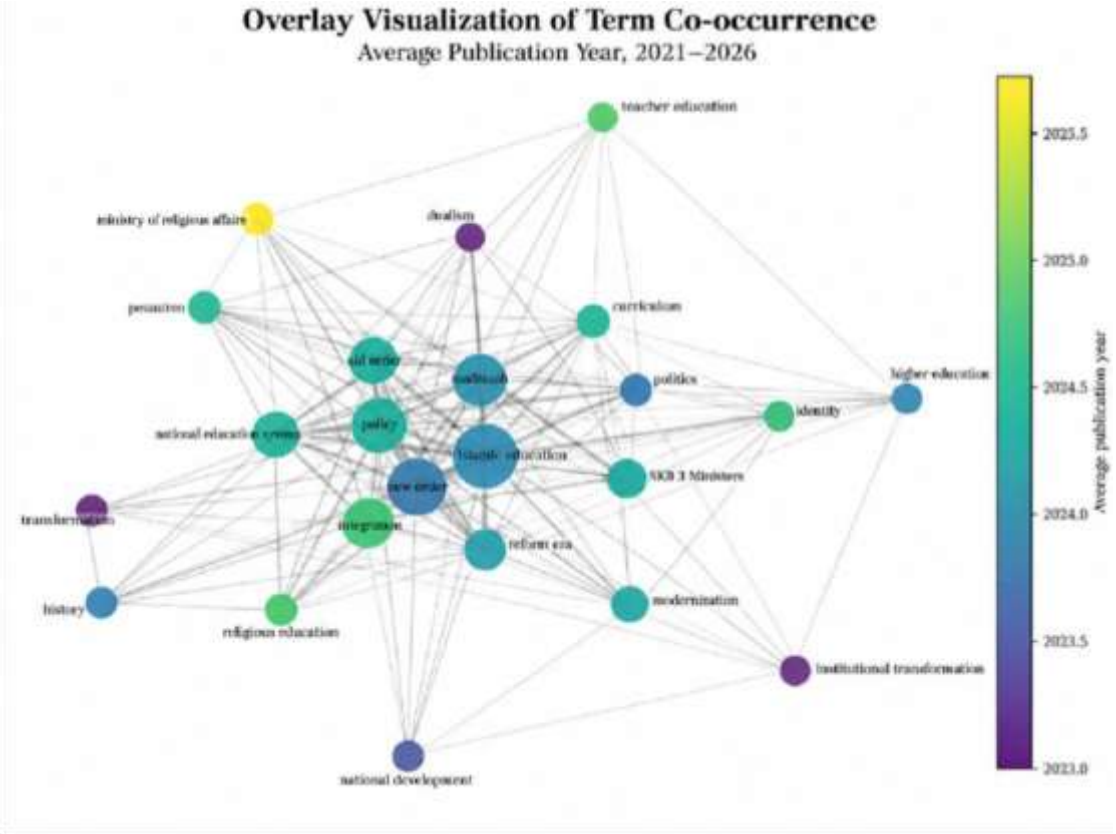
4	Madrasah	15	77
5	Old Order	14	78
6	Integration	14	66
7	National education system	13	71
8	Curriculum	9	41
9	SKB 3 Ministers	7	33
10	Politics	6	36
11	Modernization	6	28
12	Pesantren	4	25
13	Ministry of Religious Affairs	4	20



Gambar 2. Peta jaringan ko-kemunculan istilah pada kumpulan 34 studi.

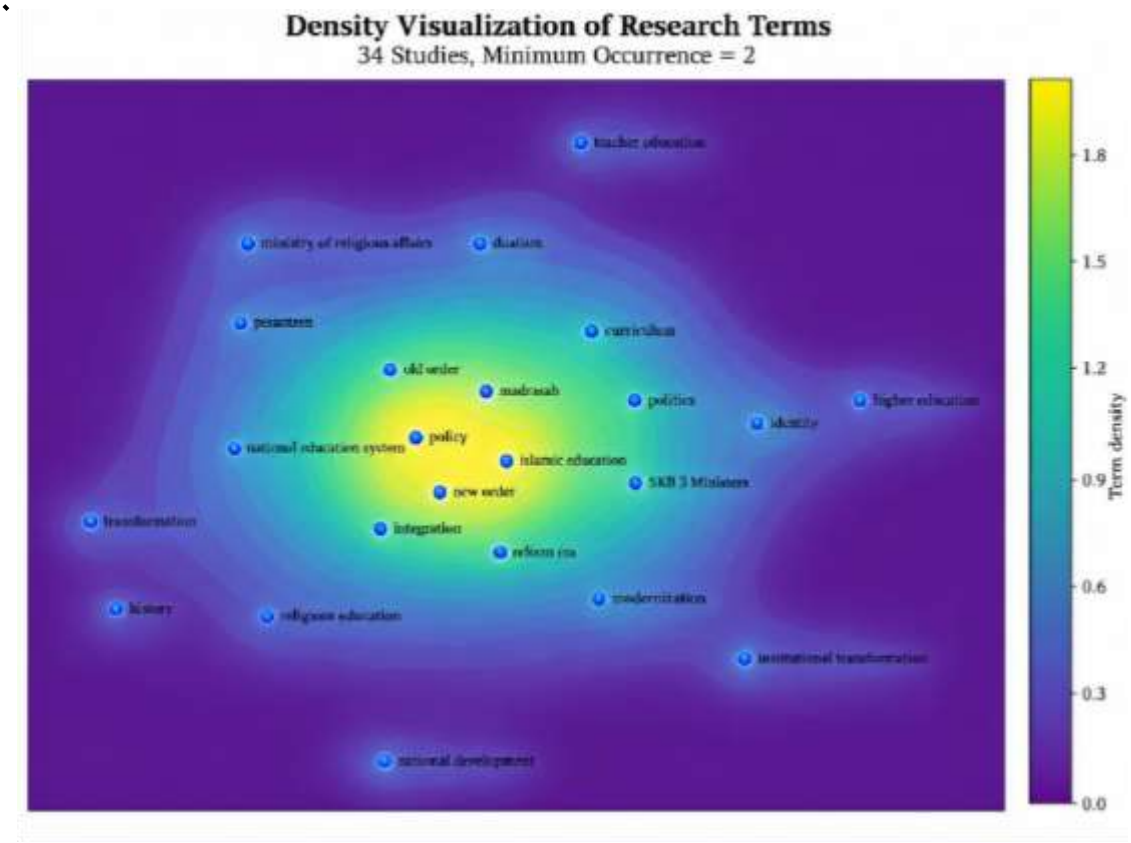
Gambar 2 memperlihatkan pusat jaringan di sekitar Islamic education, policy, New Order, madrasah, integration, dan national education system. Ukuran simpul menggambarkan intensitas kemunculan yang divisualisasikan, sementara garis menghubungkan istilah yang muncul bersama dalam sumber data pemetaan. Kedekatan tersebut memperlihatkan pertautan diskursus kebijakan pendidikan dan transformasi lembaga Islam. Posisi pesantren, higher education, curriculum, dan identity pada bagian lain jaringan menunjukkan keberagaman fokus kelembagaan serta sosial-budaya. Namun, struktur jejaring tidak membuktikan bahwa seluruh perubahan institusi berlangsung melalui

mekanisme yang sama; interpretasi tentang proses integrasi tetap bertumpu pada hasil penelitian yang disintesis.



Gambar 3. Peta overlay ko-kemunculan istilah menurut rata-rata tahun publikasi, 2021-2026.

Gambar 3 menggambarkan variasi rata-rata tahun terbit untuk istilah dalam kumpulan publikasi 2021–2026. Warna ke arah ungu dan biru menunjukkan rerata publikasi yang lebih awal, sedangkan hijau hingga kuning menunjukkan rerata yang lebih mutakhir. Istilah seperti dualism dan transformation berada pada spektrum yang lebih awal dibandingkan ministry of religious affairs dalam visualisasi ini. Perbedaan warna tersebut merupakan karakteristik kronologis publikasi penelitian, bukan urutan kejadian sejarah pada periode 1945–1998. Oleh sebab itu, overlay digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai perhatian penelitian kontemporer dan tidak ditafsirkan sebagai bukti perubahan kebijakan pada periode tertentu.



Gambar 4. Peta kepadatan istilah pada dokumentasi pemetaan ko-kemunculan.

Pada Gambar 4, intensitas warna tertinggi terkonsentrasi di sekitar policy, Islamic education, New Order, madrasah, dan integration. Konsentrasi tersebut menunjukkan kedekatan spasial dan intensitas istilah pada data pemetaan, sedangkan area dengan kepadatan rendah menunjukkan kemunculan yang lebih tersebar. Secara substantif, pola ini sejalan dengan sintesis yang menempatkan kebijakan negara dan transformasi madrasah sebagai penghubung berbagai aspek perubahan pendidikan Islam. Akan tetapi, tingkat kepadatan visual tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan banyaknya bukti empiris, keberhasilan kebijakan, atau derajat integrasi aktual pada masa 1945–1998.

Pembahasan

Integrasi sebagai proses bertingkat, bukan penyatuan yang seragam

Hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi pendidikan Islam berlangsung melalui tiga dimensi yang berkaitan tetapi tidak dapat dipertukarkan. Integrasi regulatif menyangkut pengakuan hukum, penataan administrasi, dan keterhubungan lembaga Islam dengan sistem pendidikan nasional. Integrasi kurikuler berkaitan dengan penyesuaian komposisi mata pelajaran, pengaturan jenjang, serta peluang kelanjutan studi. Adapun integrasi epistemologis

mencakup perubahan cara pengetahuan agama dan ilmu umum diklasifikasikan, dipertautkan, dan dilegitimasi. Ketiga dimensi tersebut menjelaskan mengapa keberhasilan penataan regulasi dapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan karakter kelembagaan yang khas.

Hubungan antara penyetaraan dan diferensiasi tampak jelas ketika temuan mengenai madrasah dibandingkan dengan pesantren. Kajian Nazifa et al. (2025) dan Nurhayati (2025) memperlihatkan penguatan status pendidikan Islam melalui kebijakan nasional, sedangkan Huda (2022) menunjukkan kebutuhan institusional untuk mempertahankan fungsi kaderisasi ulama melalui MAPK. Siregar (2026) juga menunjukkan bahwa modernisasi pesantren berlangsung melalui adaptasi selektif yang memelihara kontinuitas tradisi. Hasil perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi tidak menghasilkan bentuk tunggal pendidikan Islam, melainkan memperluas ruang kelembagaan bagi berbagai strategi penyesuaian. Dengan demikian, karakter utama transformasi 1945–1998 adalah penguatan hubungan dengan negara yang berlangsung bersamaan dengan diferensiasi misi dan identitas lembaga.

Hubungan perubahan politik dan respons institusi

Temuan tersebut dapat dijelaskan menggunakan perspektif historical institutionalism. Thelen (1999) mengemukakan bahwa keputusan institusional pada masa sebelumnya membentuk arah perubahan melalui mekanisme ketergantungan jalur atau path dependence. Mahoney dan Thelen (2010) memperlihatkan bahwa perubahan institusi juga berlangsung bertahap melalui layering, yakni penambahan aturan atau praktik baru pada struktur yang telah ada, serta conversion, yaitu penyesuaian fungsi institusi di dalam lingkungan yang berubah. Dalam sejarah pendidikan Islam, konsep-konsep ini membantu menerangkan bagaimana perangkat pengaturan negara berkembang di atas jaringan lembaga yang telah lama memiliki tradisi dan sumber legitimasi sendiri.

Dalam kerangka tersebut, perubahan kebijakan dari Orde Lama ke Orde Baru tidak semata-mata dibaca sebagai pergantian peraturan, tetapi sebagai penataan ulang hubungan negara, organisasi pendidikan, dan masyarakat Muslim. Kosim et al. (2023) serta Fatoni et al. (2026) menekankan pentingnya konfigurasi politik bagi orientasi kebijakan, sementara Nasution et al. (2024) menunjukkan peran jaringan organisasi dalam perkembangan GUPPI pada 1968–1992. Bukti mengenai sekolah Islam terpadu (Pribadi et al., 2024) dan adaptasi pesantren (Siregar, 2026) memperlihatkan bahwa institusi mengembangkan respons yang mengikuti sumber daya, misi, serta komunitasnya. Transformasi pendidikan Islam karenanya merupakan proses negosiasi antara kerangka regulasi nasional dan kapasitas adaptasi masing-masing lembaga.

Dualism to Integration Framework sebagai kontribusi konseptual

Berdasarkan lima tema sintesis, artikel ini merumuskan Dualism-to-Integration Framework sebagai perangkat konseptual untuk memahami transformasi pendidikan Islam. Kerangka ini menghubungkan enam dimensi

analitis, yakni dualisme struktural dan administratif, negosiasi politik negara dengan masyarakat Muslim, adaptasi kelembagaan, konvergensi kurikuler, pengakuan regulatif, dan integrasi parsial dalam sistem nasional. Hubungan antardimensi tersebut tidak membentuk urutan linear yang seragam. Pengakuan hukum dapat mendahului, menyertai, atau mengikuti perubahan praktik kelembagaan; penyesuaian kurikulum juga dapat terjadi tanpa penghilangan orientasi keilmuan yang khas. Kerangka ini dengan demikian menempatkan variasi institusional sebagai bagian dari proses integrasi, bukan sebagai penyimpangan dari tujuan modernisasi.

Tabel 4. Dimensi dan mekanisme analitis Dualism-to-Integration Framework.

Dimensi	Makna dalam kerangka sintesis	Manifestasi dalam literatur
Dualisme struktural	Perbedaan jalur otoritas, kedudukan lembaga, dan orientasi kurikulum sebagai konteks awal integrasi.	Pemisahan sekolah umum dan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan.
Negosiasi politik	Perubahan hubungan negara, organisasi pendidikan Islam, dan masyarakat Muslim.	Pergeseran orientasi kebijakan lintas rezim dan peran jaringan organisasi.
Adaptasi kelembagaan	Penyesuaian institusi sesuai fungsi pendidikan dan sumber legitimasi masing-masing.	Formalisasi madrasah, adaptasi pesantren, perkembangan sekolah Islam dan perguruan tinggi.
Konvergensi kurikuler	Penyelarasan struktur pembelajaran dan hubungan antartingkat pendidikan.	Penyesuaian komposisi pelajaran madrasah dan penguatan jalur kelanjutan studi.
Pengakuan regulatif	Penempatan pendidikan Islam dalam kerangka administrasi dan hukum pendidikan nasional.	Kebijakan penyetaraan 1975 dan penguatan kedudukan pendidikan Islam dalam UU 1989.
Integrasi parsial	Keterhubungan nasional yang tetap menyisakan diferensiasi fungsi, orientasi pengetahuan, dan identitas.	Keberlanjutan kaderisasi ulama, tradisi pesantren, serta karakter institusi yang berbeda.

Kontribusi utama kerangka tersebut terletak pada kemampuannya memisahkan proses dan hasil transformasi. Status regulatif menjelaskan kedudukan institusi dalam tata kelola negara, penyesuaian kurikulum menggambarkan perubahan organisasi pembelajaran, sedangkan identitas dan epistemologi menunjukkan keberlanjutan orientasi pendidikan yang tidak selalu berubah mengikuti regulasi. Melalui pembedaan ini, studi sejarah pendidikan Islam dapat menilai integrasi sebagai proses bertingkat yang melibatkan pengakuan, penyesuaian, dan negosiasi. Kerangka tersebut sekaligus membuka

ruang analisis komparatif terhadap madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan pendidikan tinggi di berbagai lingkungan sosial.

Implikasi Penelitian dan Agenda Kajian Historis

Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendalaman sejarah kelembagaan melalui sumber primer dan perbandingan wilayah. Arsip kebijakan dan dokumen institusi dapat menjelaskan hubungan antara pengakuan formal dan perubahan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian komparatif antarlembaga diperlukan untuk menilai variasi strategi adaptasi, sedangkan sejarah lisan dari pendidik, pengelola, santri, dan alumni dapat memperkaya pemahaman mengenai pengalaman perubahan kurikulum dan identitas. Agenda tersebut merupakan kelanjutan logis dari sintesis, terutama untuk menghubungkan sejarah regulasi nasional dengan dinamika pendidikan pada tingkat lembaga dan komunitas lokal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis. Diagram seleksi mencatat 34 studi terinklusi, sementara data ekstraksi terperinci yang digunakan dalam sintesis tersedia untuk 16 studi. Riwayat penelusuran per basis data, evaluasi kualitas individual, matriks pengodean keseluruhan studi, dan metadata asli VOSviewer tidak disertakan dalam dokumentasi yang menjadi dasar analisis. Konsekuensinya, kajian ini tidak melakukan penghitungan prevalensi tema untuk seluruh korpus, pembobotan kualitas secara kuantitatif, maupun reproduksi independen peta bibliometrik. Selain itu, pembahasan sejarah 1945–1998 melalui publikasi mutakhir tetap memiliki batas yang berbeda dari penelitian berbasis arsip primer. Keterbatasan tersebut menjadi batas generalisasi hasil, tanpa mengurangi kegunaan sintesis tematik dalam memperjelas pola hubungan antara kebijakan, institusi, kurikulum, dan identitas.

Kesimpulan

Tinjauan literatur sistematis ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam Indonesia sepanjang 1945–1998 berlangsung sebagai proses integrasi bertahap di atas struktur pendidikan yang pada awalnya dualistik. Lima tema hasil sintesis, yakni dualisme pascakemerdekaan, perubahan kebijakan negara, diferensiasi kelembagaan, kurikulum dan epistemologi, serta identitas sosio-kultural, menjelaskan keterkaitan antara penguatan pengakuan nasional dan pemeliharaan kekhasan lembaga pendidikan Islam. SKB Tiga Menteri 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menandai penguatan kerangka regulatif, sedangkan perkembangan madrasah, MAPK, pesantren, organisasi pendidikan, sekolah Islam, dan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa respons kelembagaan berlangsung dengan corak yang beragam.

Kontribusi konseptual artikel ini adalah Dualism-to-Integration Framework yang memandang perubahan pendidikan Islam melalui hubungan antara otoritas

negara, adaptasi institusi, penyesuaian kurikulum, dan keberlanjutan identitas. Kerangka tersebut mempertegas perbedaan antara pengakuan regulatif, konvergensi kurikuler, dan integrasi epistemologis sehingga transformasi pendidikan Islam tidak disederhanakan menjadi penyetaraan administratif semata. Secara keseluruhan, proses integrasi pada periode 1945–1998 menunjukkan karakter berlapis dan tidak seragam, serta mencerminkan hubungan yang terus dinegosiasikan antara sistem pendidikan nasional dan tradisi sosial-keagamaan masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

Anjasari, T. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA), 2(2), 141–155. https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34

Anwar, A. S., Nurhakim, M., & Khozin. (2024). Pendidikan Agama Islam dan dinamika politik kebangsaan di Indonesia: Studi kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Jurnal Paris Langkis, 4(2), 177–189. https://doi.org/10.37304/paris.v4i2.14462

Buchori, U., Ma'mur, I., Gunawan, A., & Syam, A. B. (2023). The epistemological structure of Islamic education in the Suharto era: A postcolonial perspective. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 15(1), 105–122. https://doi.org/10.30596/14200

Fatoni, A., Prasetyowati, F., & Sutiah. (2026). Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Analisis historis era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 8(1), 117–130. https://doi.org/10.46773/66t0xv20

Huda, M. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru dalam mengatasi krisis ulama: Kajian historis lahirnya MAPK. KUTTAB: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 6(2), 234–248. https://doi.org/10.30736/ktb.v6i2.1143

Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarok, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. Cogent Education, 10(1), Article 2172930. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930

Luthfiyani, A., & Sirozi, M. (2023). Politik pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 38–44. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3450

Mahoney, J., & Thelen, K. (Eds.). (2010). Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511806414

Malik, M. S., Astuti, K. D., Ardhyantama, V., Imaduddin, M., Andriningrum, H., & Wardani, H. K. (2025). The historical development of primary and Islamic education in Indonesia: From empire to Reform era. DIDAKTIKA: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 8(1), 33–44. https://doi.org/10.21831/didaktika.v8i1.83921

Muqofy, A. (2024). Transformasi pendidikan agama di Indonesia pasca kemerdekaan (1945–2025). JoEMS: Journal of Education and Management Studies, 7(6), 215–220. https://doi.org/10.32764/joems.v7i6.1347

Muqowim, M., & Lessy, Z. (2021). Revisiting Islamic studies: Cementing bases for integrating science and religion in Islamic higher educational institutions. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 18(1), 1–20. https://doi.org/10.14421/jpai.2021.181-01

Nasution, A. T., Ansori, M. A., Andari, A. A., Pribadi, J., & Kholil, M. (2024). GUPPI educational institutions (1968–1992). Yupa: Historical Studies Journal, 8(1), 226–239. https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3150

Nazifa, M. N., Asmuri, A., & Afandi, I. (2025). Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan, 6(1), 60–67. https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.745

Nurfadhilah, N., Zalnur, M., & Masyhudi, F. (2024). Analysis of government policies from the Old Order to the Reform era toward Islamic education. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 16(2), 304–318. https://doi.org/10.30596/21631

Nurhayati, R. (2025). Dinamika kebijakan Pendidikan Agama Islam pada masa Orde Baru. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, 4(1), 93–102. https://doi.org/10.33507/pai.v4i1.3176

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pribadi, J., Ansori, M. A., Andari, A. A., Sugianto, S., & Rosmawati, R. (2024). Integrated Islamic school education model (1980–1998). Yupa: Historical Studies Journal, 8(1), 180–191. https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3146

Rahmayanti, R., & Iswantir, I. (2024). Kurikulum Pendidikan Agama Islam. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, 3(2), 73–88. https://doi.org/10.33507/pai.v3i2.2523

Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., & Koffel, J. B. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. Systematic Reviews, 10, 39. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

Siregar, Y. D. (2026). The transformation of pesantren education from the New Order to the Reform era in terms of curriculum, methods, and Islamic educational identity. Fitrah: Journal of Islamic Education, 7(1), 16–34. https://doi.org/10.53802/fitrah.v7i1.1581

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugianto, S., Ansori, M. A., Andari, A. A., Pribadi, J., & Nisa, K. (2024). The issue of Islamic higher education development in Indonesia from 1945 to present. Yupa: Historical Studies Journal, 8(1), 192–202. https://doi.org/10.30872/yupa.v8i1.3147

Tanjung, Z. (2022). History of the development of Islamic education in Indonesia: A case study of Old Order and New Order governments (1945–1998). AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 14(4), 4765–4772. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2610

Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. Annual Review of Political Science, 2, 369–404. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369

van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3